



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA JOJOGAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Naufal Shofi Setia Al - Ghani

Universitas Galuh Ciamis

Asep Nurwanda

Universitas Galuh Ciamis

Kiki Endah

Universitas Galuh Ciamis

Korespondensi penulis : naufalshopi65@gmail.com

Abstrak Penelitian ini di latar belakang karena adanya permasalahan dimana Sosialisasi dan pelatihan dari pihak pemerintah atau LSM belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh, sehingga informasi tentang peluang pengembangan wisata belum merata diterima oleh seluruh masyarakat. Kegiatan pelatihan keterampilan masih terbatas dan belum menyasar seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak warga belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan wisata Kebijakan atau peraturan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata belum dirumuskan atau diterapkan secara jelas, sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Jojogan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang, dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, data display dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dimensi *enabling*, masyarakat Desa Cintaratu telah menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap potensi wisata alam yang ada di wisata Jojogan. dilaksanakan melalui upaya penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan langsung oleh pemerintah desa dan pengelola wisata. Namun demikian, program pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat kepada masyarakat lokal belum berjalan optimal. Pemberdayaan pada tahap *empowering* dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat keikutsertaan mereka dalam Pokdarwis dan usaha ekonomi pendukung wisata seperti jasa parkir, penyewaan alat, serta penjualan makanan dan minuman. Namun, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan belum merata kepada seluruh warga, sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas pada kelompok tertentu Pada dimensi *protecting*, perlindungan terhadap hak masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan wisata belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat belum banyak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan strategis. Meskipun sudah ada distribusi manfaat ekonomi dari sektor wisata seperti bertambahnya penghasilan masyarakat melalui jasa parkir, warung makan, dan penyewaan alat wisata, masih terdapat ketimpangan akses terhadap keuntungan tersebut. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan budaya telah dilakukan, namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh

Kata Kunci: *Pemberdayaan masyarakat*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat. Perkembangan sektor pariwisata yang dikelola

dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaa.

Pariwisata kini dianggap sebagai kebutuhan manusia modern dan menjadi sektor unggulan (*tourism is a leading sector*) untuk pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan (Frasawi & Citra, 2018). UNWTO mengemukakan bahwa 1 dari 7 orang penduduk di dunia melakukan wisata ke luar batas negara asalnya. Proyeksi tersebut akan terus meningkat 10.3 % pada tahun 2030 (Rahmawati & Sungkono, 2015:2).

Kondisi tersebut akan mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata dari masa ke masa sehingga sektor ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan kecenderungan dan perkembangan global. *Organization for Economic Cooperation and Development* pada tahun 2018 menyatakan bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran pariwisata yang semula pariwisata massal (*mass tourism*) ke bentuk pariwisata alternatif (*alternative tourism*). Pariwisata alternatif (*alternative tourism*) merupakan wisata yang berfokus pada aspek alam dan budaya dengan jumlah wisatawan sedikit atau kelompok kecil (Lestari dkk., 2016).

Motivasi wisatawan dalam mencari sesuatu yang baru dan mempunyai pengalaman wisata yang berkualitas dengan terlibat langsung dalam kegiatan berwisata menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap wisata alternatif (*alternative tourism*). Salah satu bentuk pariwisata alternatif (*alternative tourism*) adalah Wisata Pedesaan/rural tourism.

Wisata Pedesaan merupakan konsep wisata yang memanfaatkan sumber daya yang ada pada satu atau beberapa desa. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dapat berupa tradisi atau budaya yang ada di masyarakat (Maryani, 2019).

Desa wisata (*Village Tourism*) yang terbentuk dari wisata pedesaan menjadi jawaban dari perubahan dan kecenderungan pasar yang terjadi di industri pariwisata, di mana orientasi wisatawan pada mass tourism dan kemodernan bergeser pada hal-hal sederhana yang muncul dalam keseharian masyarakat sekitar (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Desa wisata merupakan salah satu tren wisata dan pilihan alternatif yang saat ini ramai diminati masyarakat untuk sekedar melepaskan stres dan melakukan refreshing. DESMA Center (*Destination Management*) sebuah lembaga konsultasi pariwisata mengemukakan bahwa berdasarkan hasil survei online di media sosial pada tahun 2021 93% masyarakat sangat tertarik untuk melakukan kunjungan ke desa wisata. Hal tersebut menjadi pendukung yang kuat bahwa kecenderungan masyarakat meninggalkan pariwisata berbasis 3S sun, sea, sand atau destinasi wisata yang populer itu benar terjadi. Oleh karena itu, bentuk kegiatan desa wisata menjadi prioritas pemerintah yang dilihat dari penambahan konsep 3S menjadi *serenity, spirituality, sustainability* dan kesadaran masyarakat bahwa lingkungan yang ada harus dijaga dan dikelola untuk kelangsungan hidup selanjutnya.

Salah satu pendekatan yang saat ini banyak dikembangkan adalah pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*), yaitu konsep pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat setempat secara aktif dan menyeluruh. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam mengelola, menjaga, dan mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Keterlibatan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemandirian lokal.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata menjadi kunci untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan keberlanjutan pariwisata

itu sendiri. Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, memiliki objek wisata alam yang dikenal sebagai Wisata Jojogan. Wisata ini menawarkan keindahan alam berupa air terjun, pemandangan sungai, dan aktivitas seperti tubing yang menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wisata Jojogan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan oleh warga sekitar. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata, peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta pembagian keuntungan yang adil antara pengelola wisata dan masyarakat. Menurut Prasetyo (2022), partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan.

Namun, pengelolaan wisata di Desa Cintaratu masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya keterampilan manajerial warga, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta rendahnya promosi wisata di tingkat regional maupun nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pariwisata. Pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kelestarian lingkungan. Konsep ini relevan bagi Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, yang memiliki potensi besar melalui destinasi wisata Jojogan.

Wisata Jojogan dikenal dengan keindahan alamnya, yang meliputi air terjun, sungai, dan pemandangan bukit yang asri. Potensi ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan pengelolaan wisata tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan destinasi wisata. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini tampak dengan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan dari pihak pemerintah atau LSM belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh, sehingga informasi tentang peluang pengembangan wisata belum merata diterima oleh seluruh masyarakat.
2. Kegiatan pelatihan keterampilan masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak warga belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan wisata.
3. Kebijakan atau peraturan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata belum dirumuskan atau diterapkan secara jelas, sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, data display dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata Jojogan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran merupakan suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal agar dapat mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat sangat penting agar mereka tidak hanya menjadi objek dalam pengembangan wisata, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam setiap aspek pengelolaan wisata. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendapat Suprayogi dalam Suaib (2023:11) meliputi 3 indikator sebagai berikut.

1. *Enabling*:

Enabling adalah upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam konteks ini, masyarakat diberikan akses terhadap informasi, pendidikan, pelatihan, serta dukungan infrastruktur yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata. Tujuannya agar masyarakat mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. *Empowering* yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

2. *Protecting*:

Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata Jojogan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebagaimana dikemukakan Suprayogi dalam Suaib (2023:11) tersebut, maka tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut.

4.1.1 Dimensi *Enabling*

Enabling adalah upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dengan didukung oleh 3 indikator yaitu Masyarakat memiliki kesadaran akan potensi wisata alam dan budaya yang ada di Jojogan, Adanya pelatihan atau sosialisasi dari pemerintah/LSM kepada masyarakat terkait peluang pengembangan wisata, Terdapat forum warga (misalnya kelompok sadar wisata) yang memberi ruang masyarakat untuk menyampaikan ide dalam pengelolaan wisata. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketiga indikator tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan 7 orang informan dengan hasil sebagai berikut

Pada dimensi *enabling*, masyarakat Desa Cintaratu telah menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap potensi wisata alam yang ada di wisata Jojogan. dilaksanakan melalui upaya penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan langsung oleh pemerintah desa dan pengelola wisata. Namun demikian, program pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat kepada masyarakat lokal belum berjalan optimal.

Pemberdayaan pada tahap *empowering* dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat keikutsertaan mereka dalam Pokdarwis dan usaha ekonomi pendukung wisata seperti jasa parkir, penyewaan

alat, serta penjualan makanan dan minuman. Namun, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan belum merata kepada seluruh warga, sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas pada kelompok tertentu.

Pada dimensi *protecting*, perlindungan terhadap hak masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan wisata belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat belum banyak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan strategis. Meskipun sudah ada distribusi manfaat ekonomi dari sektor wisata seperti bertambahnya penghasilan masyarakat melalui jasa parkir, warung makan, dan penyewaan alat wisata, masih terdapat ketimpangan akses terhadap keuntungan tersebut. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan budaya telah dilakukan, namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jojogan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dimensi *enabling*, masyarakat Desa Cintaratu telah menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap potensi wisata alam yang ada di wisata Jojogan. dilaksanakan melalui upaya penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan langsung oleh pemerintah desa dan pengelola wisata. Namun demikian, program pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat kepada masyarakat lokal belum berjalan optimal.
2. Pemberdayaan pada tahap *empowering* dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat keikutsertaan mereka dalam Pokdarwis dan usaha ekonomi pendukung wisata seperti jasa parkir, penyewaan alat, serta penjualan makanan dan minuman. Namun, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan belum merata kepada seluruh warga, sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas pada kelompok tertentu.
3. Pada dimensi *protecting*, perlindungan terhadap hak masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan wisata belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat belum banyak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan strategis. Meskipun sudah ada distribusi manfaat ekonomi dari sektor wisata seperti bertambahnya penghasilan masyarakat melalui jasa parkir, warung makan, dan penyewaan alat wisata, masih terdapat ketimpangan akses terhadap keuntungan tersebut. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan budaya telah dilakukan, namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi bagi berbagai pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Program Sosialisasi dan Pelatihan
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata Jojogan, pemerintah desa dan pengelola wisata perlu mengoptimalkan program sosialisasi dan pelatihan. Program-program tersebut sebaiknya lebih merata, dengan memperluas jangkauan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu.

Penggunaan media yang lebih beragam, baik offline maupun online, dapat menjadi alternatif untuk mencapai audiens yang lebih luas

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata

Pemberdayaan masyarakat dapat diperluas dengan memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program wisata. Pelatihan dan pendampingan harus diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, dengan pendekatan yang lebih inklusif. Hal ini bertujuan agar lebih banyak warga yang dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek pengelolaan wisata, termasuk pengembangan usaha ekonomi berbasis wisata

3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Dalam rangka memastikan keadilan dalam distribusi manfaat dari sektor wisata, masyarakat harus lebih terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Pemerintah desa dan pengelola wisata perlu membentuk forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan kegiatan wisata. Keterlibatan aktif ini akan memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan wisata tersebut

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan agar lebih memperluas penelitian terutama dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola wisata alam. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji lebih dalam tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif, serta model-model pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapannya, dari perencanaan hingga evaluasi. Peneliti juga dapat mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kapasitas manajerial, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambar Teguh, S. (2018). *Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, S. (2019). *Kesadaran masyarakat dan pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas*. Yogyakarta: Pustaka Wisata Nusantara.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2010). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford: Oxford University Press.
- Budi Santoso. (2015). *Peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata: Antara harapan dan kenyataan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Butler, R. W. (1999). *Sustainable tourism: A state-of-the-art review*. London: Routledge.
- Gunawan, R., & Rahayu. (2012). *Pengelolaan wisata berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Mitra.
- Kurniawan, A. (2015). *Pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan*. Bandung: Lestari Press.
- Mardikanto, T. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pendit, N. S. (2018). *Pengelolaan wisata alam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA JOJOGAN DI DESA
CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN**

- Prakoso, D., Wibowo, T., & Nurhadi, F. (2020). *Pemberdayaan ekonomi lokal melalui community-based tourism*. Surabaya: Litera Pustaka.
- Prasetyo, B. (2022). *Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas*. Bandung: Pustaka Wisata.
- Pratama, D. (2020). *Pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata berbasis komunitas*. Jakarta: Pustaka Wisata.
- Rahmawati, S. (2020). *Strategi pengelolaan wisata berbasis alam di Jawa Barat*. Bandung: Penerbit Ilmu Lingkungan.
- Siti Aminah. (2015). *Keadilan dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat*. Semarang: Cakrawala Pustaka.
- Suaib, M. (2023). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep, pendekatan, dan praktik*. Makassar: CV Smart Media
- Suansri, P. (2015). *Community based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour (REST).
- Suharto, E. (2019). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2017). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Surya, H. (2013). *Pengelolaan pariwisata berkelanjutan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Wibisono, A. (2022). *Community-based tourism sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Yoeti, O. A. (2019). *Pariwisata berkelanjutan: Perspektif pengelolaan berbasis komunitas*. Bandung: Pustaka Mandiri

JURNAL

- Setiawan, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata alam di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(2), 55–66.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 45–58.
- Rivaldy, Y. D. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui wisata untuk pembangunan desa mandiri: Studi di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 6(2), 122–134

UNDANG-UNDANG

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.